

REVIEW TARGET DAN CAPAIAN INDEKS PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
email: litbangkotamlg@gmail.com

Abstrak: Kebijakan evaluasi dokumen perencanaan dapat dilakukan setiap tahun atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi, salah satunya pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah mereview target dan capaian indeks program pembangunan bidang ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparasi dan analisis akar masalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika pandemic Covid-19 diperkirakan akan mempengaruhi capaian indeks program pembangunan bidang ekonomi. Kondisi ini juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sektoral/bidang yang masih belum terselesaikan sebelum era pandemi. Hasil *review* target pembangunan mengindikasikan bahwa indeks program pembangunan bidang ekonomi pada tahun 2020 tidak akan tercapai karena terjadi pergeseran, penundaan bahkan penghapusan program yang pendanaanya dialihkan ke penanganan dampak covid-19.

Kata kunci: *review* target, analisis komparasi, analisis akar masalah.

Abstract: *The planning document evaluation policy can be carried out every year or a certain time by considering the dynamics that occur, one of which is the Covid-19 pandemic which has an impact on refocusing and budget reallocation. The purpose of this research is to review the targets and achievements of the economic development program index. The analytical method used is comparative analysis and root cause analysis. The results of the analysis show that the dynamics of the Covid-19 pandemic are expected to affect the achievement of the economic development program index. This condition is also faced with sectoral / field problems that have not been resolved before the pandemic era. The results of the development target review indicate that the index of the economic development program in 2020 will not be achieved due to shifts, delays and even elimination of programs whose funding has been diverted to handling the impact of covid-19.*

Key words: *target review, comparative analysis, root cause analysis.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada kebijakan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Malang. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 menelurkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan tersebut menfokuskan pada bidang Kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Hal ini mempengaruhi implementasi program pembangunan tahun 2020 yang disusun pada tahun 2019 dan dalam keadaan normal. Disisi lain, penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer (penyesuaian DAU). Dengan penyesuaian pendapatan daerah maka belanja daerah otomatis juga menyesuaikan. Hal ini berdampak pada capaian indek program pembangunan,

dalam hal ini target capaian indikator program pembangunan bidang ekonomi yang terbagi ke dalam 7 organisasi perangkat daerah. Hal ini didasarkan pada *cascading* misi II RPJMD Kota Malang 2018-2023.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan payung hukum dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan menggunakan Teknik analisis komparasi. Sedangkan Nur (2018) melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan menggunakan Teknik analisis gap dan analisis dokumen. Sementara itu, Ma'rif, dkk., (2012) dan Santoso (2016) melakukan evaluasi dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dengan pendekatan berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat sebuah kesamaan hasil, dimana masih dibutuhkan sinkronisasi perencanaan, termasuk indikator capaian program yang digunakan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba melihat perubahan kebijakan melalui *review* target dan capaian indeks program pembangunan bidang ekonomi sebagai respon dari guncangan pandemi covid-19 dan diikuti dengan arahan perubahan kebijakan pemerintah pusat pada perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, termasuk Kota Malang.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian eksploratif (*explanatory reasearch*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan data primer sebagai justifikasi yang diperoleh melalui wawancara dan FGD.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis komparasi dan analisis akar masalah atau *Root Cause Analysis* (RCA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah. Selain itu, efisiensi belanja juga dilakukan melalui rasionalisasi Belanja Pegawai, rasionalisasi Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, dan rasionalisasi Belanja Barang Modal sekurang-kurangnya sebesar 50%, dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastuktur lainnya yang masih

memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Rasionalisasi belanja, refocusing dan realokasi diarahkan untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT). Sebagai konsekuensinya, beberapa program pembangunan akan mengalami penundaan, pergeseran, bahkan penghapusan pada tahun anggaran perubahan Tahun 2020.

Penyesuaian Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Malang Tahun 2020

Dengan adanya pandemi covid-19 dan arahan kebijakan nasional, maka prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2020 mengalami penyesuaian. Dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2020 meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.
2. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem sector industri kreatif, terutama untuk pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.
3. Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan (diantaranya melalui pembangunan jembatan kedungkandang).
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan

pemanfaatan teknologi informatika sehingga tetap produktif dan aman Covid-19.

Program Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada program pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diampu oleh Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR dan Perkim) terdapat 6 (enam) program dan 16 (enam belas) indikator program pembangunan. Pada target capaian indikator program pada tahun 2020, terdapat 2 indikator program yang tingkat capaiannya dipatok sudah sampai memenuhi target capaian (100%) pada akhri periode RPJMD (2023). Adapun indikator program tersebut adalah Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani. Hal ini mengindikasikan bahwa bangunan gedung di Kota Malang memiliki kelayakan digunakan untuk aktivitas usaha maupun peruntukkan lainnya sesuai perijinan yang berlaku. Selain itu, peningkatan monitoring dan pengawasan dapat meminimalkan pelanggaran tata ruang.

Di dalam pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur, khususnya terkait updating data jembatan, penambahan data jumlah jembatan yang semula 255 unit, kemudian setelah dilakukan update menjadi 315 unit memberikan dampak pada kebutuhan anggaran yang lebih besar di dalam mencapai target indikator Persentase jembatan kota dalam kondisi baik. Selain itu, pertumbuhan jumlah perumahan dan masih banyak perumahan yang belum diserahkan oleh Pengembangan kepada Pemerintah Kota Malang dapat menghambat capaian indikator Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak dan

Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Disisi lain, pembangunan kawasan perumahan dan perkantoran serta industri yang kurang memperhatikan aspek lingkungan mendorong semakin seringnya terjadi genangan air di saat musim penghujan dan hal ini menjadi salah satu persoalan yang sering menjadi pemberitaan hangat di media maupun masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan pembongkaran saluran drainase tertutup untuk akses limpahan air dari jalan dan normalisasi saluran secara berkala oleh petugas masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Program Pembangunan di Bidang Perhubungan

Pada program pembangunan perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan terdapat 3 (tiga) program dan 4 (empat) indikator program pembangunan.

Target pada tahun 2020 untuk indicator program persentase penurunan titik kemacetan target mencapai 73% dan target ini masih sekitar 72,60% dari target pada tahun 2023. Pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dan upaya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yang belum dilakukan dapat menghambat capaian indikator penurunan titik kemacetan di Kota Malang.

Target capaian kontribusi retribusi parkir terhadap PAD diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2020 target retribusi parkir ditarget sebesar Rp.10,1 Milyar. Target ini sudah mencapai sekitar 97,06% dari target capaian di akhir periode RPJMD (2023). Dengan program-program intensifikasi dalam pengelolaan parkir diharapkan target indikator program ini dapat tercapai, bahkan terlampaui sampai dengan akhir periode RPJMD 2023.

Sementara itu, indicator program pembangunan berupa persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan

darat/jumlah penumpang angkutan darat) pada tahun 2020 sebesar 65%. Target ini masih sekitar 82,89% dari target di akhir tahun 2023 (target sebesar 79%). Sedangkan indikator program persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2019 maupun target 2020 telah melampaui target akhir periode RPJMD 2023. Hal mengindikasikan kinerja yang baik dari Dinas Perhubungan, dan sebagai langkah awal dalam melakukan penyesuaian target sampai dengan akhir periode RPJMD.

Secara umum, Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab dalam bidang perhubungan berusaha mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat Kota Malang akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Isu kemacetan selama beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral yang harus disikapi oleh Dinas Perhubungan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, pertumbuhan aktivitas perekonomian, Pendidikan dan kurang diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang baik menjadikan tugas Dinas Perhubungan, khususnya dalam hal kemacetan semakin berat. Dampak lain dari kemacetan adalah pada lingkungan, berupa polusi udara. Di sisi lain, pertumbuhan layanan transportasi on line belum memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD dan pembangunan daerah.

Program Pembangunan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pada program pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang diampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terdapat 4

(empat) program dan 6 (enam) indikator program pembangunan.

Indikator capaian program pembinaan kepemudaan adalah persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1%. Target ini ditetapkan sama pada tahun 2021-2023. Namun, kebijakan pembatasan aktivitas sosial karena pandemic Covid-19, diperkirakan target ini akan mengalami penyesuaian.

Program pembinaan keolahragaan diukur dengan indicator persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga, dimana pada tahun 2020 ditarget sebesar 0,12%. Target ini jika tercapai maka, tingkat capaiannya terhadap target capaian akhir periode RPJMD adalah sebesar 75%. Sehingga masih ada waktu 3 tahun (2021-2023) untuk mencapai target akhir pada tahun 2023. Dengan asumsi pandemic Covid-19 masih belum berakhir pada tahun 2020, maka capaian target pada tahun 2020 akan terkoreksi. Demikian halnya Ketika pandemic covid-19 masih belum berakhir pada tahun 2021, maka akan berdampak pada capaian indicator program tahun 2021-2023.

Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dapat dilihat dengan 2 indikator, yaitu persentase destinasi wisata yang dibina dan persentase industri pariwisata yang dibina. Target capaian indicator persentase destinasi wisata yang dibina dipatok sebesar 25%. Jika target ini tercapai, maka target capainnya tercapai sebesar 42% dari target capaian pada akhir periode 2023. Sedangkan target capaian persentase industri pariwisata yang dibina pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 30% dan jika ini tercapai maka capaiannya terhadap target akhir 2023 mencapai 40%. Perkembangan pariwisata tahun 2020 sangat terpuak oleh pandemic covid-19 sehingga target ini dimungkinkan akan mengalami koreksi sampai dengan akhir tahun 2020.

Sementara itu, program pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator program berupa persentase pemasaran pariwisata dan persentase pengembangan ekonomi kreatif. Indikator program persentase pemasaran pariwisata ditarget mencapai 45% dan jika tercapai pada tahun 2020, maka tingkat capaiannya mencapai 60% dari target akhir periode RPJMD di 2023. Sedangkan indikator program persentase pengembangan ekonomi kreatif ditargetkan tercapai 25% pada tahun 2020 dan jika tercapai pada tahun 2020, maka tingkat capaiannya mencapai 50% dari target akhir periode RPJMD di 2023.

Pada tahun 2020 ini, pandemi Covid-19 akan memberikan dampak pada pelaksanaan program-program di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sehingga capaian indikator program akan mengalami penyesuaian sampai akhir 2020. Hal ini juga adanya pergeseran anggaran melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, sehingga kemungkinan terjadi penundaan bahkan penghapusan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Program Pembangunan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pada program pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdapat 10 (sepuluh) program dan 10 (sepuluh) indikator program pembangunan.

Program pembangunan Bidang Koperasi ditunjukkan dengan indikator persentase koperasi aktif yang dibina, persentase koperasi yang dinilai sehat, dan persentase koperasi aktif. Sampai dengan tahun 2019 terdapat sekitar 700 koperasi yang ada di kota Malang, hanya sekitar 100 koperasi atau 14 persen yang dinyatakan sehat. Sementara 600 koperasi lainnya masih dalam kondisi yang dinilai tidak sehat. Untuk indikator program

koperasi aktif yang dibina ditargetkan sebesar 79,85%. Jika target ini tercapai maka akan melebihi target yang sudah ditetapkan sampai dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023. Indikator koperasi yang dinilai sehat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 40% dan jika target ini terpenuhi maka capaian target pada tahun 2020 terhadap akhir RPJMD mencapai 30,92%. Untuk target koperasi aktif pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 79,85%. Tentunya, dengan situasi dan kondisi pandemic serta jumlah koperasi yang dinilai sehat hanya sekitar 14% maka perlu usaha yang lebih keras dari pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan koperasi menjadi sokong perekonomian daerah.

Selanjutnya, program pembangunan di bidang Usaha mikro ditandai dengan indikator program persentase usaha mikro yang naik menjadi kecil dan persentase wira usaha baru (WUB) Mikro yang tumbuh. Indikator program persentase usaha mikro yang naik menjadi kecil pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 40,79% dan jika target ini terpenuhi maka capaian target pada tahun 2020 terhadap akhir RPJMD mencapai 31,48%. Indikator program pembangunan persentase wira usaha baru (WUB) Mikro yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 22,91% dan jika target ini terpenuhi maka capaian target pada tahun 2020 terhadap akhir RPJMD mencapai 18,24%. Target capaian ini sepertinya akan sulit tercapai pada tahun 2020, karena banyak usaha mikro yang gulung tikar karena dampak pandemic covid-19. Selain itu, persoalan klasik seperti permodalan, akses pemasaran, kualitas yang kurang terstandarisasi membuat daya saing usaha mikro semakin menurun.

Program pembangunan di bidang industri memiliki 2 (dua) indikator program, yaitu persentase peningkatan jumlah IKM yang dibina dan persentase Industri Hasi Tembakau (IHT) yang dibina. Pada tahun 2020 capaian

persentase peningkatan jumlah IKM yang dibina ditargetkan sebesar 2% dan persentase IHT yang dibina di targetkan sebesar 30%. Jumlah IKM di Kota Malang diperkirakan lebih dari 3.200 unit usaha dan sekitar 12 IHT yang tergabung dalam Gabungan pengusaha rokok malang (Gaperoma). Situasi sulit di era pandemic covid-19 dapat berdampak pada penurunan kinerja IKM maupun IHT. Di sisi lain, jika kondisi tahun 2020 masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2020 maka capaian indikator program diperkirakan tidak akan mencapai target yang diharapkan.

Program Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perijinan

Pada program pembangunan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) terdapat 9 (sembilan) program dan 11 (sebelas) indikator program pembangunan.

Program pengembangan iklim penanaman modal memiliki indikator program persentase peningkatan jumlah minat investor. Pada tahun 2020 indikator program tersebut ditargetkan sebesar 30% dan target tersebut capaiannya terhadap kondisi akhir periode RPJMD mencapai 50%. Namun demikian, dengan kondisi pandemi pada tahun 2020, kebanyakan investor lebih menahan diri (*wait and see*) untuk melakukan investasi di tengah ketidakpastian perekonomian. Jika kondisi ini berlanjut sampai dengan tahun 2021, maka perlu penyesuaian target indikator program tersebut. Sampai dengan tahun 2020 investasi di Kota Malang masih terfokus pada Perumahan, Hotel dan restoran.

Kemudahan dan kecepatan layanan perizinan menjadi salah satu kunci di dalam menarik investor.

Indikator program yang digunakan untuk mengukur keberhasilan bidang perijinan antara lain persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat; persentase penerbitan izin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya; persentase penerbitan izin dan non izin pekerjaan umum; dan persentase realisasi target retribusi IMB. Indikator program persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15% dan target capaiannya menuju target akhir 2023 sebesar 43%. Indikator program persentase penerbitan izin dan non izin ekonomi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 82,50% dan target capaiannya menuju target akhir 2023 sebesar 92%. Indikator program persentase penerbitan izin dan non izin pekerjaan umum pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 82,50% dan target capaiannya menuju target akhir 2023 sebesar 90%. Sedangkan indikator program persentase realisasi target retribusi IMB masih belum tersedia datanya. Target-target didalam layanan perijinan sepertinya akan mengalami penyesuaian capaian sampai dengan akhir tahun 2020, hal ini karena lesunya perekonomian sebagai dampak kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19.

Program pembangunan bidang ketenagakerjaan memiliki indikator program antara lain: persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja; persentase pencari kerja yang ditempatkan; persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB); persentase peningkatan lowongan kerja; dan persentase peningkatan kesempatan kerja.

Indikator program persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 100%.

Indikator program persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 55% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 79%. Indikator program persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 96%. Indikator program persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 55% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 79%. Indikator program persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 62% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 89%. Sedangkan target indikator program persentase peningkatan lowongan kerja dan persentase peningkatan kesempatan kerja pada tahun 2020 masih belum tersedia datanya, namun ditargetkan sampai dengan akhir 2023, masing-masing targetnya sebesar 5% dan 45%.

Program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja capaiannya diperkirakan akan mengalami koreksi sampai akhir tahun 2020, karena sumber pendanaan sebagai dampak refocusing dan realokasi anggaran. Selain itu kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat juga turut menghambat capaian program bidang ketenagakerjaan. Situasi perekonomian daerah yang cenderung melambat juga berdampak pada penurunan kesempatan maupun lowongan pekerjaan.

Program Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Pada program pembangunan bidang Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 4 (empat) program dan 6 (enam) indikator program pembangunan.

Program Penataan Lingkungan Hidup dengan indikator program persentase dokumen perencanaan

Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart. Indikator program persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 85% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 100%. Harapannya setiap tahun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu persyaratan perijinan memiliki kelayakan baik secara administratif maupun substansi.

Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 dan program Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan memiliki 2 (dua) indikator program, yaitu: persentase pengurangan sampah yang berkurang di masyarakat dan sektor informal dan persentase penanganan sampah. Indikator program persentase pengurangan sampah yang berkurang di masyarakat dan sektor informal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 22% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 81%. Indikator program persentase penanganan sampah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 104%. Sampai sejauh ini, penanganan persampahan di Kota Malang berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tingkat kebersihan Kota Malang. Selain itu keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau memiliki indikator program persentase luas RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Indikator program persentase luas RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,23% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 98%. Tuntutan masyarakat akan fasilitas public seperti RTH publik semakin tinggi karena RTH memberikan kenyamanan dan keasrian

lingkungan sekaligus area untuk aktivitas olahraga, wisata maupun aktivitas lainnya bagi masyarakat dan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya lebih keras dari Pemerintah Kota Malang melakukan perluasan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena RTH di Kota Malang belum mencukupi 20% sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Program Pembangunan di Kecamatan

Pada program pembangunan di Kecamatan yang diampu oleh pemerintah tingkat kecamatan terdapat 4 (empat) program dan 7 (tujuh) indikator program pembangunan. di Kota Malang terdapat terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Dalam Analisa indikator program pembangunan digunakan kumulatif dari 5 Kecamatan. Dalam hal ini dari 7 indikator pembangunan yang dianggap sebagai pendukung indikator bidang ekonomi adalah indikator dari program peningkatan prasarana dan sarana publik yaitu: persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan; dan persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir.

Indikator program persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 22,23% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 59,81%. Indikator program persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15% dan target capaiannya terhadap target akhir 2023 sebesar 50%. Pemerintah kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota juga dihadapkan pada persoalan karena pandemic Covid-19. Penyesuaian kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota akan berdampak pada capaian indikator program pembangunan pemerintah kecamatan.

Disisi lain, beberapa indikator program pembangunan yang diamanahkan kepada pemerintah kecamatan merupakan pendukung dari capaian indikator program pembangunan dari OPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Beberapa indikator program pembangunan tersebut antara lain: persentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif; persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif; dan rasio Linmas per RT.

Analisis Akar Masalah Pada Program Pembangunan Bidang Ekonomi

Bedasarkan pada analisis akar masalah maka diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Akar Masalah Program Pembangunan Bidang Ekonomi

No	Bidang Ekonomi	Akar Masalah
1	Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumberdaya yang kompeten di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap penyediaan infrastruktur yang berkualitas. 3. Kesadaran perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan tertib yang masih perlu ditingkatkan. 4. Terkait perumahan dan Kawasan permukiman masih terdapat banyak perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah Kota Malang.
2	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dalam pembatasan aktivitas masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan dalam upaya penanganan pandemic berdampak pada

No	Bidang Ekonomi	Akar Masalah
		terhambatnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan 2. Aktivitas pariwisata dan pendukungnya yang mengalami penyesuaian karena kebijakan penanganan covid-19.
3	Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perijinan	1. Lumpuhnya sector perekonomian berdampak pada penurunan kesempatan dan lapangan kerja 2. Program pelatihan yang kurang <i>market friendly</i> , dengan kata lain kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 3. Investor masih menunggu (<i>wait and see</i>) akhir dari ketidakpastian perekonomian karena pandemic covid-19. 4. Sinkronisasi system OSS dengan kecepatan dan kondisi di daerah masih belum berjalan dengan mulus.
4	Perhubungan	1. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang kurang diimbangi dengan penambahan panjang jalan sehingga menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan. 2. Belum terbentuk moda transportasi massal yang terintegrasi sebagai solusi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
5	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1. Masih banyak koperasi yang kurang sehat bahkan tidak aktif. 2. Industry dan perdagangan sangat terdampak akibat pandemic covid-19. 3. Usaha Mikro dan industry kecil masih banyak dihadapkan pada persolan klasik seperti permodalan,

No	Bidang Ekonomi	Akar Masalah
		akses pemasaran dan standarisasi produk.
6	Lingkungan Hidup	1. Kawasan RTH yang masih belum memenuhi 20% dari wilayah Kota Malang. 2. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam budaya hidup bersih dan pengelolaan sampah.
7	Kecamatan	1. Keterbatasan SDM dalam layanan public 2. Masih perlu penguatan sinkronisasi program dengan OPD terkait.

Sumber: data diolah, 2020

Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa keterbatasan sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil kajian dari target yang telah direncanakan. Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan dalam Penggalian Data

Dalam proses penggalian data, terdapat beberapa permasalahan, antara laian:

 - a. Ketersedian data sangat terbatas, khususnya capaian indikator program, karena Sebagian besar indikator program merupakan indikator program baru yang tidak memiliki *baseline* dan time series beberapa tahun ke belakang, sehingga banyak data yang tidak dapat dilakukan proyeksi dan analisa secara komprehensif.
 - b. Sumber daya manusia saat pengisian form data sebagian besar bukan staf yang kompeten memegang data sehingga hasil datanya kurang optimal.
2. Proses Transisi, Penyesuaian SOTK dan Nomenklatur
 - a. Proses transisi dari RJMD 2013-2018 ke RPJMD 2018-2023 kurang berjalan dengan mulus, sehingga sinkronisasi program

- pembangunan masih kurang berjalan dengan baik.
- b. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdampak pada perubahan program kerja dan indikator program pembangunan.
 - c. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan program pembangunan dan OPD pengampu sehingga masih dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.
3. Kebijakan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada perubahan kebijakan pembangunan daerah. Disisi lain alokasi anggaran yang terfokus pada bidang Kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi membuat Sebagian besar program dan kegiatan mengalami penundaan, pergeseran, bahkan peniadaan program-program pembangunan yang telah ditargetkan pada perencanaan Tahun 2020. Hal ini juga berdampak pada penyesuaian target-target indikator program pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa target capaian program pembanguana bidang ekonomi akan mengalami penyesuaian atau koreksi sampai dengan akhir tahun 2020. Dengan kata lain, target-target capaian indikator program pembangunan bidang ekonomi akan sulit terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena faktor kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta kebijakan pembatasan aktivitas sosial, ekonomi dan

pemerintahan dalam upaya penanganan pandemic Covid-19.

Disisi lain, permasalahan-permasalahan dilura gejolak covid-19 masih melingkupi beberapa bidang ekonomi. Selain itu, Penyesuaian SOTK dan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 berdampak pada transisi yang belum begitu mulus, sehingga dapat menghambat capaian indikator program pembangunan.

SARAN

Sebagai tahap awal keluar dari dampak pandemic covid-19, maka proses pemulihan kondisi perekonomian pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya industri pengolahan, jasa, pariwisata, industri kreatif berbasis sumber daya lokal untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur. Upaya lainnya dapat ditempuh dengan peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif, peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan. Pemberdayaan ekonomi lokal perlu diperkuat untuk meningkatkan kemandirian daerah disertai upaya relaksasi dan insentif fiskal, salah satunya dengan *sunset policy*.

Kebijakan pemulihan industri dapat dilakukan dengan memperkuat SDM di Sektor Industri, Relaksasi dan Insentif Fiskal dengan tujuan perusahaan tetap berproduksi sehingga PHK dan perumahan karyawan tidak terus berlanjut, penguatan inovasi pemasaran untuk industri kecil dan usaha mikro.

Dukungan kebijakan lainnya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan perekonomian dan mendukung capaian indikator program antara lain: pelaksanaan program-program

pembangunan yang bersifat padat karya; melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan menyediakan system moda transportasi yang terintegrasi dan terjangkau; peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti pengembang perumahan, perusahaan filantropi, dan peningkatan swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik yang berkualitas khususnya Ruang Terbuka Hijau, drainase, dan sanitasi; Peningkatan sosialisasi dan sanksi tegas terhadap perilaku masyarakat yang kurang tertib seperti buang sampah ke sungai dan di sembarang tempat; layanan perijinan yang semakin mudah dan cepat yang disertai dengan insentif fiskal guna menarik investor; percepatan penyesuaian SOTK dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; Penyediaan anggaran di Bappeda dan OPD terkait guna pengukuran indikator capaian program, khususnya indikator program yang baru (belum terdapat pada indikator program RPJMD 2013-2018), dan peningkatan kompetensi SDM perencana di masing-masing OPD melalui pelatihan dan *short course* perencanaan dan penganggaran serta program *capacity building* secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jawa Timur. 2020. Berita Resmi Statisti (BRS)
- BPS Kota Malang. 2020. Berita Resmi Statisitik (BRS)
- BPS. 2020. Berita Resmi Statisitik (BRS) Ma'rif, Samsul., Prihadi Nugroho*), Mada Sophianingrum*), Viradin Yogiesti, Renni Nur H. Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD Dan RKPD Kota Semarang. *Riptek*. Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 39 – 50
- Nur, Syamsir. 2018. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. <https://www.researchgate.net/publication/334224415>
- Santoso, R. Slamet. 2016. Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*. Vol 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.